

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, UII Press, Yogyakarta.
- Ashworth, Andrew, 2013, *Principles of Criminal Law Seventh Edition*, Oxford University Press, Oxford.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Badan Standarisasi Nasional, 2018, *Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- Daniel W. Halpin dan Bolivar A. Senior, 2011, *Construction Management (Fourth Edition)*, John Wiley and Sons, Inc, New Jersey.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cetakan Kesepuluh*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- E. Utrecht, 2000, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2007, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, Bryan A (Eds), 1999, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, St. Paul. Minnesota
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Irwansyah, Penelitian Hukum, 2021, *Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik Edisi Ketiga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Parker, C., 2002, *The Open Corporation: Effective Self-Regulation and Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Posner, R. A, 1981, *The Economic of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts.
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Rajawali Press, Depok.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN HUKUM LAINNYA

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan LN No. 3209.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3874.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2001 No. 134 dan Tambahan LN No. 4150.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2003 No. 47 dan Tambahan LN No. 4286.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4421.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2014 No. 292 dan Tambahan LN No. 5601.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2017 No. 11 dan Tambahan LN No. 6018.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2023 No. 41 dan Tambahan LN No. 6856.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2008 No. 127 dan Tambahan LN No. 4890.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang*

Jasa Konstruksi, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2021 No. 24 dan Tambahan LN No. 6626.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2015 No. 62.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2016 No. 4.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2017 No. 119.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2018 No. 107.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2021 No. 63.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2023 No. 90.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara (LN) RI Tahun 2021 No. 67.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, *Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, Berita Negara (BN) RI Tahun 2018 No. 1121.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, *Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia*, Berita Negara (BN) RI Tahun 2021 No. 593.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, *Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun*

2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Berita Negara (BN) RI Tahun 2023 No. 262.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006*.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013*.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013*.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025 tanggal 28 Februari 2025*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 52/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 7 Oktober 2024*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024*.

Kementerian PUPR, *Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*.

C. JURNAL DAN MAKALAH

Anggun Juniamalia, Hana Faridah dan Apriyanti, "Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kontruksi", *De Juncto Delicti Journal of Law*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Heru Iriani, 2010, "Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI)", Disertasi Doktor Universitas Islam Indonesia, 2010.

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1, 2020.

Mahfud MD, 2010, "Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri dan Martabat", Makalah dalam *Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura*, Pontianak, 9 Januari 2010.

Suanro, Mizan Malik S, "Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Penafsiran Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Supandi, 2015, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)", Makalah kuliah Hukum Peradilan Administrasi Negara pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.

Yusni, "Efek Moderasi Komitmen Organisasi pada Pengaruh Implementasi E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR*, Vol. 5, No. 2, 2022.

D. WEBSITE

American Public University, "What Is Legal Risk And Why Should You Care?", <https://www.apu.apus.edu/area-of-study/security-and-global-studies/resources/what-is-legal-risk/#:~:text=Legal%20risk%20management%20is%20a,developing%20strategies%20to%20mitigate%20them.>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, "Sederet Fakta dan Asal Nama Jalan Layang MBZ Sheikh Mohammed Bin Zayed", <https://bpjt.pu.go.id/berita/sederet-fakta-dan-asal-nama-jalan-layang-mbz-sheikh-mohammed-bin-zayed>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Badan Pusat Statistik, "Indikator Konstruksi, Triwulan III-2024", <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/62f8adcf2c9f91d8b6c780db/indikator-konstruksi--triwulan-iii-2024.html>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

CNN Indonesia, "Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikat", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240703070058-12-1116927/ketua-panitia-lelang-proyek-tol-mbz-tak-punya-sertifikat>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "APBN 2024: Optimalisasi Belanja Negara untuk Mendorong Transformasi Ekonomi di Tengah Tantangan Global", <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2024:-optimalisasi-belanja-negara-untuk-mendorong-transformasi-ekonomi-di-tengah-tantangan-global>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Indonesia Corruption Watch, "Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020", https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Redflag_25042022.pdf, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Informasi APBN 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi, "Publikasi Data: Statistik Penindakan", <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Kompas, "Korupsi Tol MBZ Rugikan Negara Rp 510 Miliar, Para Pelakunya Dihukum Tak Lebih dari 4 Tahun", https://nasional.kompas.com/read/2024/07/31/08303651/korupsi-tol-mbz-rugikan-negara-rp-510-miliar-para-pelakunya-dihukum-tak?lgn_method=google&google_btn=onetap, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Kompas, "Saksi Sebut Waskita-Acset Diprioritaskan Menang Tender Proyek Tol MBZ", <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/02/18262511/saksi-sebut-waskita-acset-diprioritaskan-menang-tender-proyek-tol-mbz?page=all>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Kompas, "Sektor Konstruksi Rawan Korupsi", <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/03/09/sektor-konstruksi-rawan-korupsi>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Transparency International, "Corruption Perceptions Index", <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, "Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi", <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Hukumonline, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur "Sengaja" dalam Hukum Pidana Oleh: Nefa Claudia Meliala*)", <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=3>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Antara News, "Erick Thohir: Kontribusi fiskal BUMN hampir tembus Rp2 ribu triliun", <https://www.antaraneews.com/berita/4301923/erick-thohir-kontribusi-fiskal-bumn-hampir-tembus-rp2-ribu-triliun>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Badan Usaha Milik Negara, "Akselerator Proyek Strategis Nasional", <https://bumn.go.id/penggerak/detail/akselerator-proyek-strategis-nasional-1105670322>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Antara News, "Kementerian BUMN dukung ekonomi kerakyatan lewat UMKM naik kelas", <https://www.antaraneews.com/berita/4576518/kementerian-bumn-dukung-ekonomi-kerakyatan-lewat-umkm-naik-kelas>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, "Mencermati Kebijakan Public Service Obligation Pada BUMN", <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2009/02/16/114545-mencermati->

kebijakan-publicservice-obligation-pada-bumn, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Kementerian Pekerjaan Umum RI, "Tol Jakarta - Cikampek II (Elevated) Secara Resmi Menjadi JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED", <https://pu.go.id/berita/tol-jakarta-cikampek-ii-elevated-secara-resmi-menjadi-jalan-layang-mbz-sheikh-mohamed-bin-zayed>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Kementerian Sekretariat Negara, "Perkembangan Kemajuan Kereta Api Cepat", https://www.setneg.go.id/baca/index/perkembangan_kemajuan_kereta_api_cepat#:~:text=Proyek%20Kereta%20Cepat%20Jakarta%20Bandung,sudah%20mulai%20operasi%20tahun%202019.&text=Secara%20tegas%20pemerintah%20menyatakan%20bahwa,tertuang%20dalam%20Perpres%20107/2015., dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Kementerian Perhubungan RI, "Presiden Joko Widodo Resmikan Kereta Cepat Pertama di Asia Tenggara", <https://www.dephub.go.id/post/read/presiden-joko-widodo-resmikan-kereta-cepat-pertama-di-asia-tenggara>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Sekretariat Kabinet RI, "Presiden Jokowi resmikan LRT Terintegrasi Jabodebek", <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-resmikan-lrt-terintegrasi-jabodebek/>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Kementerian Perhubungan RI, "Menhub: Skema Pembiayaan LRT Jabodebek PT KAI Investor Utama dan PT Adhi Karya Investor Pendamping", <https://dephub.go.id/post/read/menhub-skema-pembiayaan-lrt-jabodebek-pt-kai-investor-utama-dan-pt-adhi-karya-investor-pendamping>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Sekretariat Kabinet RI, "Kurangi Macet Tol Japek, Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek dihentikan", <https://setkab.go.id/kurangi-macet-tol-japek-pembangunan-kereta-cepat-jakarta-bandung-dan-lrt-jabodebek-dihentikan/>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, KPK, "Apa yang Dimaksud dengan Survei Penilaian Integritas (SPI)", <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/buku/apa-yang-dimaksud-dengan-survei-penilaian-integritas-spi>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, KPK, "Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi", <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, "BPS-KPK Selenggarakan Survei Penilaian Integritas", <https://www.bps.go.id/id/news/2016/11/01/164/bps-kpk-selenggarakan-survei-penilaian-integritas.html>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2025